

## Abstrak

Laporan keuangan merupakan catatan informasi yang menggambarkan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi suatu entitas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD guna menjunjung tinggi akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah yang berbasis akrual, pemerintah telah menetapkan standar atau ketentuan sebagai pedoman penyusunan LKPD. Salah satu elemen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) adalah aset tetap. Aset tetap dapat disebut sebagai bagian yang cukup penting karena jumlahnya yang material. Tanpa adanya aset tetap, aktivitas operasional pemerintahan mustahil dapat berjalan dengan lancar. Mengingat pentingnya eksistensi aset tetap, sudah sepantasnya pemerintah menyajikan aset tetap dengan tepat dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada suatu entitas pemerintahan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat khususnya tahun anggaran 2020 dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku, yaitu PSAP 07. Data yang penulis gunakan merupakan data primer dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terkait definisi, pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian aset tetap secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan, meskipun masih terdapat kekurangan dan sedikit perbedaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat masih mengacu pada aturan yang sudah cukup lama, yaitu Perbup Nomor 61 Tahun 2016, yaitu bila dibandingkan dengan peraturan terbaru terdapat beberapa perbedaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat perlu memperbarui dan meningkatkan kualitas laporannya sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku.

**Kata kunci:** Akuntansi, aset tetap, pengukuran, penilaian, penyajian, pemerintah daerah

## *Abstract*

*Financial statements are informational records that describe financial positions and transactions that occur in an accounting period of an entity. As a form of accountability for the implementation of the APBN/APBD to uphold the accountability and reliability of government financial management based on accruals, the government has set standards or provisions as guidelines in the preparation of LKPD. One of the elements contained in the Regional Financial Statements (LKPD) is fixed assets. Fixed assets can be called a fairly important part because of their material amount. Without fixed assets, government operational activities are impossible to run smoothly. Given the importance of the existence of fixed assets, it is appropriate for the government to present fixed assets appropriately and correctly. This research aims to determine the accounting treatment of fixed assets in a government entity, namely the Lahat Regency Regional Government, especially the 2020 fiscal year and its conformity to the*

*applicable standards, namely PSAP 07. The data that the author uses is primary data with qualitative research methods. The results showed that the definition, classification, recognition, measurement, valuation, disclosure and presentation of fixed assets as a whole have been in accordance with established accounting standards, although there are still shortcomings and slight differences. The Lahat Regency Regional Government still refers to the rules that have been around for a long time, namely Perbup Number 61 of 2016, that is, when compared to the latest regulations there are some differences. The Lahat Regency Regional Government needs to update and improve the quality of its financial statements in accordance with the latest regulations in force.*

**Keywords:** *Accounting, fixed assets, measurement, valuation, presentation, local government.*